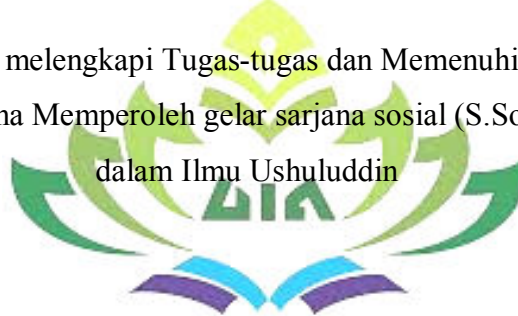


**PERAN PDI PERJUANGAN DALAM PENDIDIKAN POLITIK
MASYARAKAT MENJELANG PILKADA MESUJI TAHUN 2017**



SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh gelar sarjana sosial (S.Sos)
dalam Ilmu Ushuluddin



Oleh :

**AFEN SANDIKA
NPM. 1331040038**

Jurusan Pemikiran Politik Islam

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H/2018 M**

**PERAN PDI PERJUANGAN DALAM PENDIDIKAN POLITIK
MASYARAKAT MENJELANG PILKADA MESUJI TAHUN 2017**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh gelar sarjana sosial (S.Sos)
dalam Ilmu Ushuluddin

Oleh :

**AFEN SANDIKA
NPM. 1331040038**

Jurusan Pemikiran Politik Islam



Pembimbing I : Dr.Nadirsah Hawari, M.A
Pembimbing II : Ellya Rosana, S.Sos, M.H

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H/2018 M**

A B S T R A K

Oleh
Afen sandika

PDI perjuangan adalah organisasi politik yang terbuka untuk semua warga negara Indonesia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kedudukan sosial dan gender serta berwatak: Kebangsaan Indonesia, Kerakyatan dan Keadilan Sosial yang perjuangannya berlandaskan Pancasila. Pada awal nya msyarakat tidak tauh banyak tentang peranan mereka sebenar nya di kanca perpolitikan. Hal itu di tunjukan dengan kurang nya minat mereka tentang politik sehingga merka hanya dijadikan permainan oleh parah pelaku politik. Apalagi untuk kritis terhadap setiap kebijakan-kebijakan yang di buat.Selama ini PDI Perjuangan belum mampu secara maksimal menjalankan fungsi partai secara modern tapi lebih mirip sebagai kelompok penggemar karena adanya figure idola yakni ketua dewan Pembina PDI Perjuangan megawati suekarno putri dengan selalu membawa nama sang plokamator Ir soekarno.

Skripsi ini membahas mengenai pendidikan politik PDI Perjuangan menjelang pilkada Mesuji tahun 2017. Rumusan masalah skripsi adalah pertama bagaimanakah peran PDI Perjuangan dalam pendidikan politik terhadap maysarakat Mesuji? Kedua pendidikan politik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan pada masyarakat Mesuji menjelang pilkada tahun 2017? Penelitian ini bersifat deskriptif. metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara sebagai metode utama, metode perlengkapan adalah observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.Berdasarkan analisis yang ditemukan hasil: bahwa partai PDI Perjuangan yang ada di Mesuji bisa di bilang sudah menjalan kan peran nya sebagai partai politik terhadap masyarakat dan bentuk pendidikan politik PDI Perjuangan kabupaten Mesuji antara lain : latihan kepemimpinan, dialog public, debat terbuka, kampanye dialogis, kelompok binaan atau menjalin mitra dan lain-lain yang sejenis dengan nya. Titik tekan selama ini adalah pembinaan langsung kepada kelompok masyarakat.model yang di terapkan tersebut belum bisa berjalan secara maksimal. Strategi pendidikan politik PDI Perjuangan dengan menerapkan pola monitoring, evaluasi dan agitasi, advokasi serta propokasi melalui strategi tersebut partai dengan mudah untuk masuk ke kehidupan masyarakat. Sehingga partisipasi masyarakat terhadap politik meningkat.

MOTTO

“Kewajiban Kita Lebih Banyak Dari Pada Masa Yang Ada Pada Kita

Oleh Karena Itu Gunakan Masa Dengan Sebaik-Baiknya Dan

Ringkaskanlah Pelaksanaannya” .

.....IMAM HASAN AL – BANNA.....



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua ku yang sangat kusayangi dan kukasihi .bapak salim dan ibu ernawati, mereka yang banyak mengajarkan tentang arti dari perjuangan hidup.
2. Mbak-mbak dan kakak-kakak ipar ku nita Erika dan suami yesi monica dan suami terima kasih atas dukungan dan suport nya selama ini
3. Teman-teman seperjuangku di Angkatan 13 khususnya Jurusan Pemikiran Politik Islam terima kasih atas kegilaan yang sering kita jalani selama kita kuliah.
4. Teman-teman sehimpuan dan secita HMI Cabang Bandar Lampung khususnya komisariat Ushuluddin.
5. Parah sedulur ku PSHT angkatan 2015 dan komisariat PSHT kampus UIN raden intan lampung
6. Buat adik-adik ku the joms tetap selalu jaga kekompakannya
7. Para dosen dan stap yang ada di kampus yang telah mendidik dan memberikan bimbingan dalam perkuliahan dan skripsi.
8. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu pengetahuan serta pengamalan yang tidak bisa dilupakan.

RIWAYAT HIDUP

Afen sandika dilahirkan di kampung yang sangat sanagat terpencil pada tanggal 7 juni 1994 kampung yang terletak di perbatasan antara Sumatra selatan dan lampung kampung sungai badak nama nya kampung yang termasuk salah satu dari kesembilan kampung tua yang ada di kabupaten Mesuji. Kabupaten Mesuji adalah kabupaten hasil pemekakaran dari Kabupaten Tulang bawang yang mekar menjadi 3 Kabupaten yaitu tulang bawang, tulang bawang barat, dan kabupaten Mesuji pada tahun 2009. Kabupaten Mesuji sendiri itu mempunyai 7 kecamatan dengan 114 desa dan di kecamatan. Dilahirkan dari Rahim seorang ibu yang bernama hernawati dan di besarkan dengan penuh kasih sayang tanggung jawab yang besar oleh sorang bapak yang bernama salim. Mereka lah penyemangat hidupku.

Saya adalah anak ke 3(tiga) dari 3(tiga) bersaudara dan saya adalah satu-satunya anak lelaki. Ketika 2001 saya mengenyam penddikan dasar pada usia 7 tahun di SDN 1 sungai badak dan berhasil menyelesaikan pendidikan sampai tahun 2007, ketika pada tahun 2007 saya melanjutkan ke jenjang SMP dan saya memilih SMP.I.T. Namiroh Jaya dan berhasil menyelesaikan pada tahun 2010, pada tahun 2010 saya melanjutkan ke SMA yaitu di SMAN 1 MESUJI yang alhamdulillah saya di beri kepercayaan untuk menjadi ketua OSIS di sekolah tersebut dan berhasil menyelesaikan pada tahun 2013, pada tahun 2013 saya melanjutkan ke perguruan tinggi. Pada tahun 2013 saya melanjutkan ke perguruan

tinggi dan yang menjadi pilihannya adalah kampus IAIN Raden Intan dan di terima di fakultas Ushuluddin di jurusan Pemikiran Politik Islam. Selama mengenyam pendidikan di kampus, saya banyak mengikuti organisasi baik intra maupun ekstra, intra antara lain ukm pencak silat yang ahlamdulillah saya di beri kepercayaan untuk menjadi ketua komisariat persaudaraan setia hati terate (PSHT). Ekstra yaitu Himpunan mahasiswa islam (HMI) KOMISARIAT USHULUDDIN dan himpuanan mahasiswa Mesuji (HAMAS), persatuan mahasiswa Mesuji (PMM). Menurut saya organisasi lah yang banyak memberikan pengajaran tentang banyak hal dan dengan organisasi lah kita bisa mengembangkan potensi diri kita. Jadi berorganisasi lah apapun oraganisasi nya.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil' Alamin

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana social dalam ilmu ushuluddin universitas islam negeri (UIN) raden intan lampung. Dengan judul skripsi “peran PDI Perjuangan dalam pendidikan politik masyarakat menjelang pilkada Mesuji tahun 2017”.

Penyusunan skripsi ini mendapatkan bantuan dari berbagai pihak untuk itu penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. bapak DR. Arsyad Sobby Kesuma, Lc. MA, selaku dekan fakultas ushuluddin UIN raden intan lampung beserta staf pimpinan yang telah berkenan memberikan kesempatan dan bimbingan kepada penulis selama studi
2. bapak DR. Nadirsah Hawari, M.A selaku ketua jurusan pemikiran politik islam, ibu Tin amalia Fitri, M.Si selaku sekretaris jurusan pemikiran politik islam.
3. Bapak DR. Nadirsah Hawari, M.A selaku pembimbing 1 dan ibu Ellya Rosana, S.sos., M.H yang telah dengan susah payah memberikan bimbingan dan pengarahan secara ikhlas dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak ibu dosen fakultas ushuluddin yang telah ikhlas memberikan ilmu-ilmunya dan motivasi penulis dalam menyelesaikan studi di fakultas ushuluddin UIN lampung.
5. Kepala perpustakaan UIN raden intan lampung beserta staf yang telah turut memberikan data berupa literature sebagai sumbu dalam penulisan skripsi ini.
6. Karyawan dan karyawan fakultas ushuluddin UIN raden intan lampung yang telah memberikan kelancaran penulis sehingga selesai penulisan skripsi ini.

7. Ketua DPC PDI Perjuangan kabupaten Mesuji, bapak Edy Sucipto beserta staf yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di partai tersebut.

Skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahannya, hal ini disebabkan karena terbatasnya kemampuan penulis, untuk kesempurnaannya diharapkan kritik dan saran dari pembaca sehingga skripsi ini dapat tersusun lebih baik dan lebih sempurna.

Semoga amal jasa dan dorongan yang telah diberikan mendapatkan imbalan dari Allah SWT, mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat serta turut mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan di bidang politik khususnya pada jurusan pemikiran politik islam.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
RIWAYAT HIDUP.....	ix
KATA PENGHANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Kegunaan penelitian.....	7
G. Metode penelitian.....	8
H. Analisis data.....	10
I. Tinjauan Pustaka	11

BAB II. PERAN PARTIA DAN PENDIDIKAN POLTIK

A. Partai Politik	14
1. Pengertian Partai Politik	15
2. Fungsi partai politik.....	16
3. Tujuan partai poltik	19
4. Pakta politik dan persepsi politik	20
B. Pendidikan poltik	23
1. Pengertian pendidikan politik	23
2. Tujuan pndidikan politik	24
C. Pemilu (pemilihan umum).....	27

D. Pemilu Demokratis	29
----------------------------	----

BAB III. SEJARAH PARTAI

A. Sejarah lahirnya PDI Perjuangan.....	32
B. Perspektif ideology dan program partai.....	46
C. Azas	46
D. Ciri dan watak	46
E. Tujuan	46
F. Fungsi.....	47
G. Platform.....	48

BAB IV. PENDIDIKAN POLITIK PDI PERJUANGAN MENJELANG

PILKADA MESUJI TAHUN 2017

A. Peran kader PDI perjuangan dalam pendidikan politik	50
B. Pendidikan politik yang dilakukan oleh kader PDI Perjuangan	54

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul skripsi ini “Peran PDI Perjuangan dalam Pendidikan Politik Masyarakat Menjelang Pilkada Kabupaten Mesuji Tahun 2017. Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul skripsi ini, maka perlu diberikan penjelasan istilah- istilah yang terdapat didalamnya.

Peranan (role) memiliki aspek dinamis dalam kedudukan (status) seseorang. Peranan lebih banyak menunjuk satu fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Menurut Anton Moelyono (1949), peranan adalah sesuatu yang dapat diartikan memiliki arti positif yang diharapkan akan mempengaruhi sesuatu yang lain.¹ Pentingnya peranan adalah karena mengatur perilaku seseorang .

Peranan yang dimaksud disini adalah peran dari kader PDI Perjuangan yang ada di kabupaten mesuji dalam memberikan pendidikan politik masyarakat agar masyarakat dapat memahami lebih dalam tentang politik yang ada di sekitarnya.

Pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang yang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pembelajaran dan perhatian; proses, cara pembuatan mendidik.

Pendidikan yang diberikan adalah pendidikan orang dewasa yang di mana masyarakat khususnya masyarakat mesuji diuntut untuk berfikir kritis dan tauh seperti apa memilih pemimpin yang baik dengan atau tanpa menjual hak mereka.

¹Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, (Jakarta, Rajawali, 1986) h 212

Pendidikan politik adalah upaya yang dilakukan secara sistematis untuk membentuk masyarakat sadar politik dan mampu menjadi pelaku politik.

Masyarakat adalah orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan.² Masyarakat penelitian ini adalah orang berumur 17 keatas atau yang sudah memiliki hak pilih.

Partai politik ini bernama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang di singkat PDI Perjuangan. PDI Perjuangan yang untuk selanjutnya disebut partai, didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya. Dewan pimpinan pusat partai berkedudukan di jakarta atau ibukota negara Republik indonesia. Wilayah partai meliputi seluruh wilayah negara kesatuan republik indonesia yang ter struktur sesuai jenjang administrasi pemerintahan dan wilayah perwakilan luar negeri yang di bentuk oleh Dewan pimpinan pusat partai. Partai berasaskan pancasila sebagai mana termaktub dalam pembukaan undang-undang dasar negara indonesia tahun 1945 dengan jiwa dan semangat kelahiran pada 1 juni 1945. PDI Perjuangan yang dimaksud peneliti di sisni adalah DPC PDI Perjuangan yang ada di Kabupaten Mesuji..³ PDI Perjuangan yang peneliti maksud di sini adalah PDI Perjuangan DPC kabupaten mesuji dan ruang lingkupnya, yang beralamat di Jln. ZA Pagar Alam desa gedung ram kecamatan tanjung raya. Kepengurusan partai pertama kali di bentuk pada tahun 2008.

Penegasan istilah-istilah judul ini adalah pendidikan politik yang dilakukan oleh kader PDI Perjuangan kepada masyarakat Mesuji tentang cara-cara apa yang mereka lakukan untuk menerapkan pendidikan politik pada pemilihan kepala

²Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, (Jakarta, Rajawali, 1986), h.26

³AD/ART PDI Perjuangan kongres IV di bali, h 62 pasal 1.2.3.4.5

daerah yang di laksanakan serentak di beberapa daerah yang berada di Provinsi Lampung tahun 2017 salah satu nya kabupaten mesuji.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan peneliti memilih judul tersebut diatas adalah:

1. Penelitian tentang pendidikan politik terhadap masyarakat yang dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan yang di selenggarakan di kabupaten Mesuji layak dijadikan objek penelitian karena melihat kebiasaan masyarakat yang ada di sana ketika pemilu yang dimana masyarakat cenderung tidak peduli dengan masalah perpolitikan yang ada di daerah nya.
2. Pemilihan langsung kepala daerah merupakan moment penting bagi masyarakat untuk memilih pemimpinnya, namun suksesi pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan di Kabupaten Mesuji rawan menciptakan konflik yang diakibatkan oleh ketidak puasan hasil pilkada. kondisi seperti ini maka pendidikan politik perlu disampaikan oleh Partai politik kepada masyarakat.
3. Penelitian ini sesuai dengan jurusan yang peneliti tekuni yaitu Pemikiran Politik Islam, selain itu dengan literatur yang cukup memadai sehingga peneliti berkeyakinan bahwa penelitian ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan.

C. Latar Belakang Masalah

PDI Perjuangan sebagai partai politik yang mempunyai slogan partai wong cilik tentu mengedepankan kepentingan masyarakat sehingga hak-hak masyarakat mengenai politik itu semua bisa terpenuhi.

Partai yang menghimpun dan membangun kekuatan politik rakyat dan memperjuangkan kepentingan rakyatnya di bidang ekonomi, social, dan budaya secara demokratis, berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional guna mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan ketertiban dunia.

Pendidikan politik merupakan bagian dari pendidikan orang dewasa, khususnya diarahkan kepada upaya membina kemampuan mengaktualisasikan diri sebagai pribadi otonom bebas dan pada sosialisasinya, dalam kaitannya dengan statusnya sebagai masyarakat sosial selaku warga negara.

Pendidikan politik berusaha membawa individu kepada konsistensi diri yang mandiri untuk menuju arah yang lebih baik dan tidak bersikap apatis untuk dijadikan mekanisme yang kuat untuk menentukan sikap-sikap politik, memilih alternatif politik paling relevan, kemudian melakukan berbagai langkah-langkah yang lebih tepat.

Pendidikan politik diarahkan pada pembentukan pribadi manusia sebagai partisipasi politik yang baik dan aktif, persyaratannya antara lain adalah sebagai berikut:

1. Individu tersebut harus memiliki cukup informasi politik agar mempunyai wawasan sehat terhadap peristiwa-peristiwa politik dan masyarakat.
2. Mampu bersikap dan mampu menentukan sikap-sikap politik, dan mempersiapkan diri sebagai pelaku politik yang baik.
3. Melakukan banyak kebijakan politik untuk masyarakat.⁴

keadaan yang terjadi dimasyarakat sekarang ini partisipasi yang penuh dan bertanggung jawab dari rakyat itu tidak bisa berlangsung secara otomatis, hal ini disebabkan oleh kejadian sebagai berikut:

1. Pemilu saat ini hanya menjadi rutinitas lima tahunan, dimana masyarakat seakan dijadikan konsumen ataupun aktor penting yang diperbutkan suaranya bagi calon para pemimpin kepala daerah yang bertarung dipilkada, masyarakatpun dimanjakan dengan berbagai perhatian dan diberikan impian untuk hidup lebih baik oleh para petarung dalam pilkada demi kemenangannya.
2. Disamping itu terlalu kompleksnya susunan masyarakat modern dengan dimensi-dimensi sosial dan politik yang saling berkaitan, yang sulit dipahami oleh masyarakat awam, sehingga orang tidak tahu bagaimana cara berpartisipasi dimedan politik.

Kondisi rakyat sekarang ini masih serba keterbelakangan dan ketidak tahuan akan politik, PDI Perjuangan adalah partaisering bersentuhan langsung dengan masyarakat kecil oleh sebab itu PDI Perjuangan melakukan banyak sekali arahan-

⁴Kartini Kartono, *Pendidikan Politik Sebagai Dari Pendidikan Bagian Orang Dewasa*, (Bandung, Mandar Maju, 2009), Cet. Ke-3 h.27

arahankhususnyakepadamasyarakat untuk merangsang partisipasi politik secara aktif dari rakyat dalam usaha pembangunan, perlu adanya pendidikan politik antara lain:

1. Menjadikan masyarakat yang sadar politik.
2. Lebih aktif dalam partisipasi politik di era pembangunan.
3. Sekaligus menghumanisasikan masyarakat, agar masyarakat menjadi lebih nyaman dan sejahtera untuk dihuni oleh semua warga Indonesia.⁵

Point- point diatas merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh Partai politik, mengingat masih banyaknya masyarakat yang minim akan pengetahuan tentang politik. Partai politik memiliki tugas memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, dimana Partai politik tiadak hanya memberikan perhatian kepada masyarakat saat masa kampanye lalu kemudian dilupakan, dibubarkan tanpa adanya evaluasi.

Partai PDI Perjuangan yang ada di mesuji sudah sangat di kenal dan di senangi oleh masyarakat mesuji oleh sebab itu PDI Perjuangan mudah untuk masuk dan di terima oleh masyarakat khusus nya Mesuji. Dengan demikian partai PDI Perjuangan sangat mudah untuk melakukan pendidikan poltik yang akan mereka terapkan kepada masyarakat. Dengan mengadakan beberapa kegiatan seperti latihan kepemimpinan, dialog publik, debat terbuka, kampanye dialogis, menyambangi rumah tokoh-tokoh agama maupun masyarakat

⁵*Ibid.*, h.27

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan penelusuran pada latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakahperankader PDI Perjuanganandalampendidikanpolitik?
2. Bagaimanakahpendidikan politik yang dilakukan oleh kader PDI Perjuangan pada masyarakat Mesuji menjelangPilkada 2017 ?

E. Tujuan Penelitian

Bertolak dari latar belakang masalah dan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perankaderPDI Perjuanganandalampendidikanpolitik.
2. Untukmengetahuipendidikan politik yang dilakukan oleh kader PDI Perjuangan pada masyarakat Mesuji menjelangPilkada 2017.

F. Kegunaan Penelitian

1. Pendidikanpolitikitumerupakanalahsatufaktorpentingbagipengembangan wawasanmasyarakatmengenaipartaipolitik.
2. Pendidikan politik PDI Perjuangan pada masyarakat Mesuji memberikan tambahan kecerdasan secara social maupuan politik.

G. Metode Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Untuk hal tersebut maka dalam sebuah penelitian dibutuhkan metode yang sesuai. Hal ini dimaksudkan agar penelitian dapat berjalan secara sitematissehingga mencapai hasil yang diharapkan. Metode penelitian yang dimaksud yaitu:

1. Jenis dan Sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Dilihat dari jenis penelitian ini, adalah penelitian lapangan atau “ **Field Research**” yaitu penelitian yang dilakukan mengangkat data yang ada dilapangan. Adapun data-data lapangan adalah data-data yang berkaitan dengan sejarah, stuktur keorganisasian, idiologi dan tujuan dari Partai Kebangkitan Bangsa dalam Pilkada Gubernur ditahun 2014 yang diselenggarakan di Kecamatan Tanjung Senang kota Bandar Lampung.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin mengenai sesuatu yang menjadi objek, gejala-gejala atau kelompok tertentu.⁶



2. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan individu yang akan diteliti atau yang akan dijadikan objek penelitian.⁷ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengurus pimpinan tingkat DPC yang berjumlah 13 orang PDI Perjuangan di Kabupaten Mesuji.⁸

⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, Bhineka Cipta, 1997), h. 105

⁷Sutrisno Hadi, *Metodologi Riseach II*, Yogyakarta, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1973), h.225

⁸Surat Keputusan Kepengurusan PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji

b. Sampel

Sampel adalah sebagian objek yang diselidiki dari seluruh objek penelitian.⁹ Penentuan jumlah sampel dipilih secara sampel quota karena setiap stratum (lapisan/subyek menurut lapisan-lapisan) ditentukan berdasar sifat-sifat atau ciri-ciri yang mempunyai pengaruh terhadap objek yang akan diteliti. Sampel dalam penelitian ini, peneliti akan mengambil sampel kepada seluruh jaran kepengurusan dari tingkat DPC yang berjumlah 13 orang dan beberapa orang dari unsur masyarakat. Rinciannya yaitu sebagai berikut:

- 1) Pihak PDI Perjuangan mulai dari tingkat DPC yang berjumlah 13 orang.
- 2) Pihak dari unsur masyarakat yang terdiri dari anggota masyarakat yang masing-masing berada di ruang lingkup pengurusan dari tingkat DPC yang berjumlah 13 orang
3. Metode Pengumpulan Data

maka penulis menggunakan beberapa metode yaitu sebagai berikut:

a. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, notulen rapat, agenda kegiatan, program kerja, anggaran dasar rumah tangga, serta dokumen penting lainnya.¹⁰ Tataran operasionalnya peneliti program kerja Partai PDI Perjuangan. Hal ini penting peneliti pergunakan untuk menyertai dan sebagai penjelas sumber data.



b. Metode Wawancara

Metode wawancara (*interview*) adalah Metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan kepada tujuan penelitian.¹¹

Metode ini digunakan untuk mengungkapkan data-data dengan letak geografis, stuktur keorganisasian, ideologi dan tujuan dari Partai PDI Perjuangan serta upaya untuk strategi yang dilakukan dalam memberikan pendidikan politik.

H. Analisis Data

Setelah data terkumpul sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan, maka langkah berikutnya adalah menggunakan analisa data kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka, tetapi berupa serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian tetapi masih merupakan data-data verbal, atau masih dalam bentuk keterangan-keterangan saja.¹²

Analisis deskriptif ini digunakan dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada dengan menggunakan pendekatan berfikir induktif. Maka dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan berfikir induktif yaitu cara berfikir berangkat dari kata-kata, peristiwa yang konkrit, kemudian dengan fakta-

⁹Cholid Narbuto Dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*,(Jakarta, Bumi Aksara, 2008), Cet. IX, h. 107

¹⁰*Ibid*,h.11

¹¹Iqbql Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Dan Aplikasinya*, (Bogor, Ghalia Indonesia,2002), h.11

¹²Syaipan Djambak, *Metodologi Penelitian*,(Palembang, Universitas Sriwijaya, 1998), h.78

fakta yang khusus dan konkrit tersebut ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.¹³

Data dan fakta hasil pengamatan dilapangan atau pengalaman empiris disusun, diolah, untuk kemudian ditarik maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum.¹⁴ Maksud dari metode ini yaitu suatu cara menganalisa data-data yang ada dari lapangan baik berupa fakta, peristiwa atau kasus yang konkrit terjadi.

I. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah merupakan suatu bagian dari skripsi yang bersifat sentral. Selain itu dari segi uraiannya, tinjauan pustaka adalah bagian dari skripsi yang paling panjang. Artinya melalui suatu tinjauan pustaka tersebut, seseorang dapat mengetahui secara jelas, meskipun secara garis besar, tentang penelitian yang akan dilaksanakan, baik menyangkut masalah penelitian serta cara penelitian yang akan dilaksanakan.¹⁵

Sejauh penelitian mencari sumber data tentang judul penelitian di atas, penelitian ini tidak sama dengan penelitian-penelitian terdahulu. Meskipun terdapat kesamaan dalam penelitian berbentuk buku, karya ilmiah, dan skripsi yang mengkaji tentang pendidikan politik, penelitian mengarahkan pada Peran PDI

¹³ Sutrisno Hadi, *Op. Cit.*, h. 42

¹⁴ Nana Sudjana, *Prosedur Karya Ilmiah*, (Bandung, Sinar Baru, 1991), h. 6

¹⁵ Kaelan M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Jogjakarta: paradikma, 2005), h.

PerjuangandalampendidikanpolitikmasyarakatmenjelangpilkadaKabupaten Mesuji tahun2017 , danfokuspenelitianpadapadapendidikanpolitikmasyarakat Mesuji.

Adapunkaryailmiah yang berhubungan dengan judul ini di antaranya:

1. Karya ilmiah yang berjudul *Strategi Partai politik Dalam Rekrutmen Calon Kepala Daerah Prespektif Islam* karya Rini Yuniarti Fakultas Ushuluddin tahun 2013, karya ilmiah ini terfokus kepada rekrutmen calon kepala daerah. Isi dari karya ilmiah tersebut menjelaskan tentang mekanisme pencalonan kepala daerah yang dilakukan oleh Partai PDI Perjuangan DPC Pringsewu.
2. Karya ilmiah yang berjudul *Strategi Partai Keadilan Sejahtera Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat* karya Dede Munawaroh Fakultas Ushuluddin tahun 2014, karya ilmiah ini hanya terfokus kepada sosialisasi yang dilakukan Partai melalui dakwah aqliyah kepada masyarakat. Isi karya ilmiah tersebut terfokus kepada sosialisasi saja yang bertujuan untuk merih partisipasi masyarakat.
3. Karya ilmiah yang berjudul *Fungsi Pendidikan Politik Partai Demokrat Study pelaksanaan pemilu 2009* karya Ikhwanudin, hanya terfokus kepada bentuk pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Partai Demokrat kepada para kadernya pada pemilu legislatif tahun 2009. Isi karya ilmiah ini terfokus kepada pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Partai yang bersifat eksklusif dan formalitas untuk para kadernya saja.
4. Buku yang berjudul *pendidikan politik sebagai bagian dari pendidikan orang dewasa* karya DR. Kartini Kartono, buku ini berisi tentang teori-

teori tentang pendidikan politik agar rakyat dapat ikut serta turut aktif dalam politik, dalam upaya membina kemampuan mengaktualisasikan diri sebagai pribadi yang otonom.

Berdasarkan beberapa tinjauan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang peneliti susun ini memiliki perbedaan dengan karya-karya ilmiah yang pernah ditulis oleh para peneliti sebelumnya, perbedaan itu terletak pada fokus penelitian peran PDI Perjuangan dalam pendidikan politik yang dimana partai

PDI

Perjuangan diterjunkan langsung memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang perpolitikan yang sebenarnya yaitu pendidikan yang diharapkan dapat menguntungkan bagi mereka artinya mereka pun memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.



BAB II

PERAN PDI PERJUANGAN DALAM PENDIDIKAN POLITIK

MASYARAKAT

A. Partai Politik

Partai politik pertama tama lahir di eropa barat , hal ini di tandai dengan meluasnya gagasanya bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu di perhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rayat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain. Partai politik mumnya dianggap sebagai manifestasi dari suatu memodernisaasi diri. Dewasa ini negara negara baru pun sudah menggunakan partai politik yang biasa di jumpai.

Negara negara yang menganut paham demokrasi, gagasan mengenai partisipasi rakyat mempuyai dasar idiologis, bahwa rakyat berhak untuk turut menentukan siapa siapa yang akan menjadi pemimpin yang nantinya mementukan kebijakan umum (public policy). Negara negara totalier gagasan mengenai partisipasi didasari dengan pandangan elite politiknya bahwa rakyat perlu di bimbing dan dibina untuk mencapai stabilitas yang langgeng, maka partai politik merupakan alat yang baik.

Permulaan berkembangnya di negara negara Barat seperti Inggris dan Perancis, kegiatan politik pada mulanya dipusatkan kelompok kelompok politik dalam parlemen. Kegiatan ini mula-mula bersifat elitis dan aristokratis, mempertahankan kepentingan kaum bangsawan terhadap tuntutan raja. Hal ini di

latarbelakangi meluasnya hak pilih , kegiatan politik juga berkembang di luar parlemen dengan terbentuknya panitia-panitia pemilihan yang mengatur pengumpulan suara para penduduknya menjelang masa pemilihan umum.

Kelompok-kelompok politik dalam parlemen dengan panitia pemilihan yang sepaham dan sekepentingan, oleh karena di rasa perlu memperoleh dukungan dari berbagai golongan masyarakat, maka lahirlah partai politik. Partai semacam ini menekankan kemenangan dalam pemilihan umum dan dalam masa antara dua pemilihan umum biasanya kurang aktif, bersifat *patronage party* (partai pelindung) yang biasanya tidak memiliki disiplin partai yang ketat.¹⁶

1. Pengertian Partai Politik

Partai Politik adalah salah satu komponen yang penting di dalam dinamika perpolitikan sebuah bangsa. Partai politik di pandang sebagai salah satu cara seseorang atau sekelompok individu untuk meraih kekuasaan, argumen seperti ini sudah biasa kita dengar di berbagai media massa ataupun seminar –seminar yang kita ikuti khususnya yang membahas tentang partai politik.

Definisi Partai Politik merupakan sekumpulan orang yang secara terorganisir membentuk sebuah lembaga yang bertujuan merebut kekuasaan politik secara sah untuk bisa menjalankan program-programnya. Parpol biasanya mempunyai asa tujuan, ideologi, dan misi tertentu yang diterjemahkan ke dalam program-programnya, parpol juga mempunyai pengurus dan massa.¹⁷ Roger F Saltou mendefinisikan partai politik sebagai kelompok warga negara yang sedikit

¹⁶Miriam Budiarto, *DasarDasarIlmuPolitik*, GramediaPustakaUtama, Jakarta, 2006, cet Ke-28 h 159-160

banyak terorganisasikan, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan kebijakan umum yang mereka buat¹⁸.

Mengacu pada dua definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa partai politik merupakan hasil perorganisasian dari sekelompok orang agar memperoleh kekuasaan untuk menjalankan program yang telah direncanakan.

2. Fungsi Partai Politik

Fungsi partai politik dalam Negara demokrasi adalah sebagai berikut:

a. Partai sebagai sarana komunikasi politik

menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengatur sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat masyarakat berkurang. Masyarakat modern yang begitu luas, pendapat dan aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tak berbekas seperti suara di padang pasir, apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada. Proses ini dinamakan "Penggabungan kepentingan" (*interest aggregation*). Setelah digabung pendapat dan aspirasi ini diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang teratur, proses ini dinamakan "perumusan kepentingan" (*interest articulation*).

b. Partai sebagai sarana sosialisai politik

Sosialisasi politik diartikan bagaimana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. Biasanya proses sosialisasi berjalan secara berangsur-angsur

¹⁸http://www.kpu.go.id/propartai/propartai_list.php, Diakses tanggal 28 september 2017

dari masa kanak-kanak sampai dewasa. Sosialisasi politik juga mencakup proses melalui apa masyarakat menyampaikan politik juga mencakup proses melalui apa masyarakat menyampaikan norma-norma dan nilai-nilai dari generasi berikutnya.

c. partai politik sebagai sarana recruitment politik

Mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (*political recruitment*) caranya ialah melalui kontak pribadi, persuasi, dan lain lain. Juga diusahakan untuk menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader yang di masa mendatang akan mengganti pimpinan lama (*selection of Leadership*)

d. Partai politik sebagai sarana pengatur konflik (*conflik management*)

suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan dalam masyarakat merupakan soal yang wajar, jika sampai terjadi konflik partai politik berusaha untuk mengatasinya.¹⁹



Fungsi partai politik dalam undang-undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2008 Bab V pasal 11 sebagai berikut:

- a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.

¹⁸[http://djokoyuniarto.multiply.com/journal/item/6/PARTAI POLITIK](http://djokoyuniarto.multiply.com/journal/item/6/PARTAI%20POLITIK), Diakses tanggal 30 oktober 2017

¹⁹ Miriam. *Op. Cit.* h. 163-164

- c. penyerap penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
- d. partisipasi politik warga negara indonesia
- e. rekrutment politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender²⁰.

3. Tujuan Partai Politik

a. Tujuan umum partai politik adalah

- 1) Mewujudan cita-cita nasional bangsa indonesia sebagaimana di maksud dalam pembukaan undang –undang dasar negara republik indonesia tahun 1945
- 2) Menjaga dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik indonesia
- 3) Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rayat dalam negara kesatuan republik indonesia²¹.



b. Tujuan khusus partai politik:

- 1) meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan.
- 2) Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 3) membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.²²

²⁰Tim redaksifokus media, *undang-undangpolitik*, Fokusmedia, Bandung, 2009.h.167-168

²¹ibid

Berdasarkan uraian atas penulis menyimpulkan bahwa tujuan partai politik adalah melakukan sosialisasi politik. Satu, pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat, kedua, rekrutment politik yaitu seleksi dan pemilihan satu pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik. Ketiga, partisipasi politik, kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan ikut menentukan pemimpin pemerintahan. Empat, pemdu kepentingan, mengatur lalu linyas kepentingan yang seringkali bertentangan dan memiliki orientasi keuntungan sebanyak-banyaknya. Lima, komunikasi politik melakukan proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah. Enam, pengendalian konflik, partai politik melakukan pengendalian konflik mulai dari perbedaan pendapat sampai pada pertikaian fisik antar individu atau kelompok. Tujuh, kontrol politik, partai politik melakukan kegiatan untuk menunjukan kesalahan, kelemahan dan penyimpangan dalam isi kebijakan atau pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

4. Fakta Politik dan Persepsi Politik

A. Fakta Politik

Fakta atau realitas politik sebenarnya sudah berlangsung sejak manusia hidup bersama dalam sebuah masyarakat. Sejak manusia ada di bumi dan berinteraksi secara terus menerus dalam sebuah masyarakat, secara hakiki mereka sebenarnya sudah berpolitik. Berinteraksi satu sama lain, saling mengatur, dan

²²Tim RedaksiFokus media, *ibid*

mengurus berbagai urusan hidup bersama untuk satu tujuan atau kemaslahatan tertentu.

Interaksi sosial yang terus menerus adalah kata kunci dari ekstensi suatu masyarakat. Jenis masyarakat . Yaitu : kita bisa melihat interaksi ekonomi (sejak dari barter hingga jual beli), interaksi sosial (bertetangga saling menolong), interaksi politik (berhubungan adanya pemimpin dan dipimpin serta ada kebijakan bersama menuju tujuan masyarakat itu).

Interaksi antar individu dan kelompok adalah inti keberadaan masyarakat . interaksi politik, sama artinya kita membicarakan sejarah manusia bermasyarakat baik dalam dimensi sejarah, sosiologi , dan antropologi.²³

Fakta ini, menurut seorang pakar ilmu politik, prof. Dr. Ramlan Surbakti, menyatakan. “kita tidak bisa lepas dari politik , baik secara sengaja terlibat atau sengaja tidak terlibat dalam kehidupan bermasyarakat”. Praktek politik itu sebenarnya bukan hal baru bagi manusia sepanjang zaman, dulu, kini dan masa yang akan datang.

interaksi politik melingkupi kehidupan sehari-hari kita sebagai sebuah masyarakat. Wajarlah jika Aristoteles menganggap bahwa manusia pada hakikatnya adalah Zoon Politicon (makhluk politik). Artinya, makhluk yang senantiasa berinteraksi, saling mengatur dan memimpin satu sama lain.

Aristoteles menjuluki ilmu politik sebagai *master of science*, yang harus di pelajari oleh siapapun. Praktek politik sebenarnya seumur peradaban manusia, masalahnya adalah apa persepsi kita tentang politik. Penting dicatat, persepsi kita

²³M.D.Riyan, *Political Quotient MeneladaniPrilakuPolitikParahNabi*, Madani Prima, Bandung,2008.h 02

tentang politik akan bergantung pada dua hal. (*Pertama*), konsep kita tentang politik, hal ini subjektif bergantung keyakinan dan ideologi seseorang. Kita harus memahami konsep politik, untuk memahami konsep politik ini bisa kita lakukan dengan membaca buku literatur politik.

(*Kedua*), kecermatan kita mengenai realitas politik sebagai sebuah kenyataan hidup manusia. Artinya mengajak kita untuk meneliti dan mengobservasi apa sebenarnya politik sehingga bisa menjadi pemahaman tidak sejalan dengan fakta politik akan sejalan dengan itu.²⁴

Senyatanya, bahwa saat ini hakikat politik terkaburkan dengan persepsi politik terkait dengan keyakinan atau ideologi tertentu. Hakikat politik terkubur dengan persepsi politik seseorang atau sekelompok orang tertentu. Khalifah Umar bin al-Khattab r.a. Pernah mengatakan, “*tafaqqahuu qabla a tashuduu*”, pahami oleh kalian konsep politik, sebelum kalian berkuasa (berpolitik).

Pesan ini penting karena pemahaman yang salah tentang politik akan melahirkan tindakan politik yang salah. Sebaliknya, jika pemahaman kita benar, perilaku kita dalam berpolitik akan ada dalam kebenaran²⁵.

B. Persepsi Politik

Persepsi adalah pemahaman yang diyakini dan menjadi dasar tindakan. Persepsi politik akan bergantung pada keyakinan dan ideologi politik seseorang. Sekali lagi, keyakinan yang salah akan melahirkan perilaku politik yang salah. Keyakinan yang benar akan melahirkan perilaku yang benar. Contoh, bagi jenderal A, politik adalah perebutan kekuasaan, maka ia mengumpulkan kekuasaan dan

²⁴*ibid.* h. 03

²⁵*ibid.* h. 04

bagaimana dia mempertahankan. Bandingkan dengan tuan B yang berprinsip bahwa politik adalah cara meraih tujuan.

Bagi tuan B, yang penting tujuan, apa pun akan dilakukan termasuk yang haram sekalipun demi tercapainya tujuan, lalu kita bandingkan dengan professor C yang memahami politik adalah pengaturan urusan rakyat, ia meraih kekuasaan dengan cara jujur dan melakukan pengaturan dengan berpegangan pada prinsip-prinsip kebenaran.²⁶

Realitas politik bersifat objektif dan apa adanya, sedangkan pemahaman politik bersifat subjektif, tergantung pada keyakinan dan ideologi yang mendasari.

B. Pendidikan Politik

1. Pengertian pendidikan politik

dalam kajian dan pemikiran tentang pendidikan terlebih dahulu perlu diketahui ada 2 (dua) istilah yang hampir sama bentuknya dan sering dipergunakan dalam dunia pendidikan, yaitu *pedagogi* (pendidikan) dan *pedagogik* (ilmu pendidikan). Pedagogi atau ilmu pendidikan ialah yang menyelidiki, menenungkan tentang gejala-gejala perbuatan mendidik. Istilah ini berasal dari kata "*pedagogia*" (yunani) yang berarti pergaulan dengan anak-anak. Sedangkan yang sering digunakan *pedagogos* adalah seorang pelayan (bujang) pada zaman yunani kuno yang pekerjaannya mengantar anak ke dan dari sekolah *paedagogos* berasal dari kata *paedos* (anak) dan *agoge* (saya membimbing, memimpin). Perkataan *paedagogos* yang pada mulanya berarti pelayanan berubah menjadi pekerjaan mulia. Karena pengertian *pedagog* (dari *pedagogos*) berarti seorang yang tugas

²⁶*ibid.h.* 5-6

nya, membimbing anak didalam pertumbuhan nya ke daerah berdiri sendiri dan bertanggung jawab.²⁷

pendidikan adalah salah satu bentuk interaksi manusia. Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seorang atau kelompok orang dalam mendewasakan manusia dengan upaya pengajaran dan pelatihan.²⁸

Menurut budiarjo, perkataan politik berasal dari bahasa yunani yaitu *polistaia*, polis yang berarti kesatuan masyarakat yang mengurus diri sendiri atau berdiri sendiri (negara) sedangkan taia berarti urusan.²⁹

Sementara itu, politik berasal dari bahasa belanda yaitu *politiek* dan bahasa inggris *politics*, yang masing-masing bersumber dari bahasa yunani *politika* yang berhubungan dengan negara dari akar kata nya *polites*– warga negara dan *polis*– negara kota. Dan dari kata *polis* tersebut bisa didapatkan beberapa kata, diantaranya: *polites* : warga negara atau warga kota; *politicos* : ahli negara ; *politieke empisteme* : ilmu politik ; *politeia*: segala hal ikhwal yang menyangkut polis atau negara.³⁰

Pendidikan politik merupakan bagian dari pendidikan orang dewasa, khususnya di arahkan kepada upaya membina kemampuan mengaktualisasikan diri sebagai pribadi otonom. Ada beberapa pengertian pendidikan politik menurut parah ahli:

²⁷Fuadlhasan, *Dasar-Dasarkependidikan*, (Jakarta: rinekacipta , 2008), h. 1

²⁸ B.N. Marbun, *kamus politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2002), h. 416

²⁹Meriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1991)

³⁰ Fatahullah Jurd, *Studi Ilmu politik*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014) h. 9

menurut kartini adalah:

a. Pengertian politik adalah upaya edukatif yang intensional, disengaja dan sistematis untuk membentuk individu sadar politik , dan mampu menjadi pelaku politik yang bertanggung jawab secara etis/moral dalam mencapai tujuan-tujuan politik.

b. Pendidikan politik adalah bentuk pendidikan orang dewasa dengan menyiapkan kader-kader untuk petarung politik dan mendapatkan penyelesaian politik, agar menang dalam perjuangan politik.³¹

Menurut R. Hayer pendidikan politik ialah usaha membentuk manusia partisipan yang bertanggung jawab dalam politik.

Unsur pendidikan dalam pendidikan politik itu pada hakikatnya merupakan aktifitas pendidikan diri yaitu mendidik dengan sengaja diri sendiri yang terus menerus berproses di dalam person, sehingga orang yang bersangkutan lebih mampu memahami dirinya sendiri dan situasi serta kondisi lingkungan sekitarnya. Kemudian mampu menilai segala sesuatu secara kritis, selanjutnya menentukan sikap dan cara-cara penanganan permasalahan-permasalahan.

2. Tujuan pendidikan politik

Tujuan pendidikan dan pengajaran di Indonesia ialah untuk membentuk manusia susila yang cakap, dan warganegara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air berdasarkan asas Pancasila

³¹ *kartinikertono , pendidikan politik sebagai bagian dari pendidikan orang dewasa*, MandarMaju, Bandung, 2009. Cet. Ke-3. h. 64

dan UUD 1945.³² Sejalan dengan tujuan pendidikan nasional kita tersebut diatas, maka tujuan pendidikan politik di indonesia ialah :

- 1) Menampilan peranan insani/humani setiap individu yang unik selaku warganegara, dengan jalan mengembangkan potensi dan bakat kemampuan semaksimal mungkin.
- 2) Agar mampu aktif berpartisipasi dalam proses politik untuk membangun bangsa dan negara.³³

Peranan insani ini memungkinkan terjadinya pengembangan Bakat dan kemampuan setiap individu dan melaksanakan fungsi politiknya sesuai dengan status dan misi hidup masing-masing. Semua aktivitas dilembagakan atas dasar kebebasan dan kemauan sendiri, dalam relasi konfrontatif maupun kerjasama. Yaitu dengan memusyawarahkan secara bersama, dalam kegiatan memformulasikan jawaban-jawaban dari masalah-masalah sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Pendeknya dengan cara berdialog dalam kelompok-kelompok politik secara terbuka, diarahkan ke upaya membangkitnya dan meningkatkan partisipasi politik yang kreatif, guna membangun kesejahteraan umum serta budaya nasional di tengah relasi-relasi kemasyarakatan, disertai rasa tanggung jawab penuh.

Pendidikan politik yang diawali dengan kegiatan mendapatkan banyak informasi politik sebagai pengoperan pengetahuan (transmisi ilmu) itu mendapatkan persefektif kemasyarakatan: yaitu untuk kepentingan banyak orang

³²Firmanzah, *mengelola partai politik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008.h.75.

³³ibid .h. 82

dan rakyat, kemudian dilanjutkan dengan aksi/perbuatan politik secara nyata, yaitu:

- a) Mempertegak dan memperkuat harkat dan kedudukan manusia, dengan menekankan aspek-aspek moril, etis/susila, dan estetisnya di tengah kehidupan politik.
- b) Mampu memahami situasi sosial-politik penuh konflik
- c) Berani bersikap tegas memberikan kritik membangun terhadap kondisi masyarakat yang tidak mantap
- d) Aktivitasnya diarahkan pada proses demokratisasi individu/atasu perorangan, dan demokratisasi semua lembaga kemasyarakatan serta lembaga negara.
- e) Sanggup memperjuangkan kepentingan dan ideologi tertentu, khususnya yang berkorelasi dengan keamanan dan kesejahteraan hidup bersama.³⁴



Berdasarkan uraian di atas, Pendidikan Politik di Indonesia dapat dinyatakan sebagai :

- a. Rangkaian upaya edukatif yang sistematis dan intensif untuk memantapkan kesadaran politik dan kesadaran bernegara, dalam menunjang kelestarian Pancasila dan UUD 1945 sebagai falsafah hidup serta landasan konstitusional.

³⁴*ibid.h* .83

- b. Melakukan upaya pembaruan kehidupan politik bangsa Indonesia, dalam rangka tegaknya satu sistem politik yang demokratis, sehat, dan dinamis.³⁵

Karakteristik kepribadian bangsa Indonesia yang berkaitan dengan dimensi politik yang diharapkan bisa dibina lewat pendidikan politik antara lain :

- a. Sadar akan hak, kewajiban, tanggung jawab etis/ moral dan politik terhadap kepentingan bangsa dan negara; mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dan memberikan keteladanan yang baik.
- b. Dengan sadar menaati hukum dan UUD 1945; memiliki disiplin pribadi, disiplin sosial, dan nasionalisme yang teguh dan tidak sempit atau chauvinistik.
- c. Berpandangan jauh ke depan (futuristik), dengan tekad perjuangan mencapai taraf kehidupan bangsa yang lebih tinggi, berkeadilan dan berkesejahteraan, didasarkan pada kemampuan objektif dan kekuatan kolektif bangsa Indonesia sendiri.
- d. Aktif berpartisipasi dan kreatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam kegiatan pembangunan nasional dan pembangunan politik.
- e. Secara berkesinambungan menggalang persatuan dan kesatuan bangsa dengan kesadaran adanya keanekaragaman/ pluriformitas suku-suku

³⁵ *ibid*

bangsa dan agama, serta mendukung sistem kehidupan nasional yang demokratis.

- f. Dasar akan perlunya memelihara lingkungan hidup manusia dan lingkungan alam sekitar agar lestari, waras, dan imbang (terjamin ekosistemnya) sebagai wadah kehidupan yang sehat.³⁶

C. Pemilu (Pemilihan Umum)

Salah satu wujud pelibatan masyarakat dalam proses politik adalah pemilihan umum (pemilu). Pemilu merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan negara atau daerah dalam periode tertentu. Ketika demokrasi mendapat perhatian yang luas dari masyarakat dunia, penyelenggaraan pemilu yang demokratis menjadi syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan yang benar-benar mendekati kehendak rakyat. Oleh karena itu, pemilu merupakan salah satu sarana legitimasi kekuasaan.³⁷

Pemilu dapat dikatakan aspiratif dan demokratis apabila memenuhi beberapa persyaratan. (Pertama), pemilu harus bersifat kompetitif, dalam artian peserta pemilu harus bebas dan otonom, (Kedua), yaitu yang diselenggarakan secara berkala, dalam artian pemilu harus diselenggarakan secara teratur dengan jarak waktu yang jelas. (Ketiga), pemilu harus inklusif, artinya semua kelompok masyarakat harus memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu. Tidak ada satupun kelompok yang diperlakukan secara diskriminatif dalam proses pemilu. (keempat), pemilu harus diberi keleluasaan untuk mempertimbangkan dan mendiskusikan alternatif pilihannya dalam suasana bebas, tidak di bawah

³⁶*ibid*

tekanan, dan akses memperoleh informasi yang luas. (kelima), penyelenggara pemilu yang tidak memihak dan independen, kedudukannya sebagai pilar demokrasi.³⁸

Peran partai politik dalam sistem perpolitikan nasional merupakan wadah seleksi kepemimpinan nasional dan daerah. Pengalaman dalam rangkaian penyelenggara seleksi kepemimpinan nasional dan daerah melalui pemilu membuktikan keberhasilan partai politik sebagai pilar demokrasi. Penyelenggaraan pemilu tahun 2004 dinilai cukup berhasil oleh banyak kalangan, termasuk kalangan internasional. Gambaran ini dapat dikatakan bahwa sistem perpolitikan nasional dipandang mulai sejalan dengan penataan kehidupan berbangsa bernegara yang di dalamnya mencakup penataan partai politik.³⁹

Peran partai politik telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi sistem perpolitikan nasional, terutama dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang dinamis dan sedang berubah. Jika kapasitas dan kinerja politik dapat ditingkatkan, maka berpengaruh besar terhadap peningkatan kualitas demokrasi dan kinerja sistem politik, oleh karena itu, peran partai politik perlu ditingkatkan kapasitas, kualitas dan kinerjanya agar dapat mewujudkan aspirasi dan kehendak rakyat dan meningkatkan kualitas demokrasi.

D. Pemilu Demokratis

Pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI

³⁷Dawan Rahardjo, *Sistem Pemilu : Demokrasi dan pembangunan*, CIDES, Jakarta, 1995. h. 28

³⁸Syamsuddin Haris dan Ignan Kleden, *Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005. h. 25-26.

³⁹*Ibid.* h. 15

Tahun 1945, dimaksudkan untuk memilih presiden dan wakil kepala daerah yang mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan dapat menyerap serta memperjuangkan aspirasi rakyat dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.⁴⁰

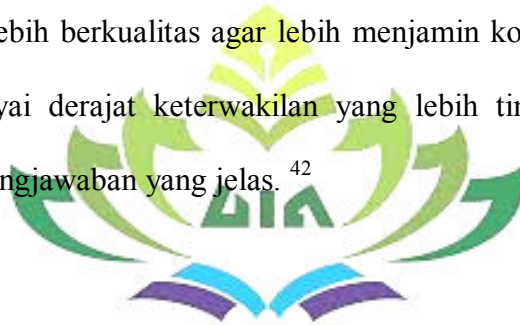
Terselenggara pemilu secara demokratis menjadi dambaan setiap warga negara Indonesia. Pelaksanaan pemilu dikatakan berjalan secara demokratis apabila setiap warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dapat menyalurkan pilihannya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Setiap pemilih hanya menggunakan hak pilihnya satu kali dan mempunyai nilai yang sama, yaitu satu suara. Hal ini yang sering disebut dengan prinsip *one person, one vote, one value* (opovov). Pemilu bersifat langsung adalah rakyat sebagai pemilih berhak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hatinya tanpa perantara. Warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih berhak mengikuti pemilu dan memberikan suaranya secara langsung. Sedangkan pemilu yang bersifat umum mengandung makna terjaminnya kesempatan yang sama bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi.

Pemilu yang bersifat bebas berarti bahwa setiap warga negara yang berhak memilih bebas untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun untuk melaksanakan haknya. Setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga

⁴⁰Komarudin Hidayat, *Azyumardi Azra, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2003, h. 152.

dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya . Pemilu yang bersifat rahasia berarti oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun.⁴¹

Pemilu diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas yang dilaksanakan secara lebih berkualitas, sistematis, legitimate, dan akuntabel dengan partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih , dan semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama dan bebas dari kecurangan atau perlakuan yang tidak adil dari pihak manapun. Pemilu harus dilaksanakan secara lebih berkualitas agar lebih menjamin kompetisi yang sehat, partisipatif, mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi, dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.⁴²



⁴¹*ibid*

BAB III

SEJARAH PARTAI

A. Sejarah Lahirnya PDI Perjuangan

Sejarah lahirnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) tidak bisa dilepas dari konflik yang terjadi di dalam tubuh Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan menguatnya sosok Megawati Soekarnoputri di panggung politik.

PDI lahir pada 10 Januari 1973, sebagai fusi dari 5 partai politik (parpol) pasca Pemilu 1971, yang tergabung dalam Kelompok Demokrasi Pembangunan. Kelima parpol tersebut adalah Partai Nasional Indonesia (PNI), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Murba, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), dan Partai Katolik. Berfusnya kelima parpol memang tak lepas dari peranan pemerintah saat itu yang berupaya menjalankan agenda politik memperkecil jumlah parpol dengan alasan untuk lebih mudah mengendalikan stabilitas politik.

Para deklarator PDI yang terlibat pada saat fusi itu antara lain : Mohammad Isnaeni dan Abdul Madjid (PNI), Ben Mang Reng Say dan FS Wignyosumarsono (Partai Katolik), Sabam Sirait dan A.Wenas (Parkindo), S Murbantoko dan Djon Pakan (Partai Murba) sementara dari IPKI diwakili

⁴²<http://www.djpp.depkumham.go.id/htn-dan-puu/507.html>, Diakses tanggal 1 Desember 2017.

Achmad Sukmadidjaja dan MH Sadri. Namun di kemudian hari, pada 11 Oktober 1994, IPKI menyatakan diri kembali kepada jati diri ormas yang independen, non politik dan non afiliasi.

Komposisi partai menyusun yang terdiri dari berbagai latar belakang itu membuat PDI harus mengakomodasi berbagai perbedaan bentuk dan warna politik. Secara umum dua parpol Kristen menganut aliran keagamaan, sementara sisanya nasionalisme dalam variasi masing-masing. Pada rapat pertama lima pimpinan parpol, Mohammad Isnaeni, Ketua PNI, terpilih menjadi Ketua Umum PDI yang pertama. Sementara petinggi dari partai kepengurusan PDI saat itu terdiri dari 25 anggota MPP (Majelis Pimpinan Pusat) dan 11 DPP (Dewan Pimpinan Pusat) termasuk Ketua Umum, 5 Ketua dan 4 Sekjen.

Konflik dalam tubuh partai hasil fusi dengan banyaknya jajaran pimpinan (ketua dan sekjen) segera terlihat sejak tahun – tahun awal. Baru berusia tiga tahun, struktur kepemimpinan PDI sudah goyah oleh pertentangan antara Mohammad Isnaeni yang pada saat itu.

Menjabat sebagai Ketua DPR/MPR dengan Soenawar Soekawati, yang menjabat Menteri Negara Bidang Kesra Kabinnet Pembangunan II. Banyak pertentangan yang terjadi pada kepemimpinan PDI dan tidak jelas penyebab pertentangan petinggi PDI tersebut. Dan akhirnya di dalam Kongres I PDI pada 13 April 1976 akhirnya diputuskan bahwa kedua petinggi yang bertentangan tidak lagi menjadi pemimpin DPP.

Setelah konflik tersebut, rentetan konflik dalam struktur DPP kembali terjadi

berulang-ulang. Secara umum pemicunya adalah tokoh elite yang sebelumnya pernah berseteru. Dua tahun setelah penyelesaian konflik di tingkat DPP PDI selesai, pada 2 Januari 1978 muncul DPP tandingan dengan pimpinan Mohammad Isnaeni. Kubu Isnaeni berupaya menyaingi Ketua DPP hasil Kongres Usep Ranuwidjaya. Sebagai perwujudan sikap oposisi, mereka berencana merayakan HUT ke-5 PDI dengan tanggal yang berbeda. Kubu Isnaeni akan merayakan pada tanggal 17 Januari 1978. Sementara DPP hasil Kongres menyatakan HUT PDI akan dirayakan lebih awal pada tanggal 10 Januari 1978. Meski tampak kronis, perseteruan antara kedua kelompok petinggi yang bersaing ini akhirnya bisa dipersatukan kembali dalam sebuah pertemuan di gedung BAKIN Jakarta. Sebagai

langkah kompromi, Mohammad Isnaeni dan kelompoknya dimasukkan ke dalam jajaran kepengurusan Ketua DPP.

Pasca penyelesaian konflik di antara kelompok tersebut, masalah bukannya selesai. Keresahan timbul di antara kader pada lapisan bawahnya. Kelompok Isnaeni tampaknya tidak berhenti oleh kesepakatan di lapisan DPP.

Ragam konflik yang terjadi dalam lima tahun pertama berdirinya PDI pada dasarnya menjadi ciri khas dinamika internal PDI yang berkelanjutan pada waktu-waktu sesudahnya. Di tengah percaturan politik nasional yang terjadi saat itu terdiri 3 orsospol, PDI menjadi satu-satunya partai yang paling sering dilanda kegudahan internal. Pada satu sisi, demokrasi dan kebebasan banteng ini. Namun

di sisi lain, kebebasan berpendapat membuat friksi antarkader mudah meledak menjadi konflik terbuka. Hingga pada tahun 1978, belum ada konflik di tubuh PDI yang menjadi pertentangan fisik. Namun keadaan mulai berubah. Tercatat pada tanggal 15 Desember 1979 sebuah kelompok menamakan diri Pimpinan Pelaksana Harian DPP yang diketuai AP Batubara mengambil alih kantor DPP PDI dan menjalankan tugas keseharian DPP. Demikian pula pada era 1980-an, konflik yang terjadi

masih melibatkan nama tokoh-tokoh elit lama seperti Hardjanto Sumodisastro yang berseteru dengan Soenawar Soekawati.

Satu dekade setelahnya, PDI masih terus direpotkan oleh berbagai pertentangan di antara jajaran elit partai. Ketua Umum pada saat itu, Soerjadi, ditentang kelompok Achmad Subagyo yang membuat manuver politik dengan membentuk DPP Peralihan pada 21 Agustus 1991. Kelompok Subagyo yang didukung oleh aparat keamanan beranggapan DPP PDI pimpinan Soerjadi sudah demisioner sejak 2 Mei 1991. Perjalanan konflik itu terus berlanjut hingga terselenggaranya Kongres PDI VI di Medan.

Intervensi pemerintah PDI melalui tangan-tangan aparat keamanan dan pejabat sopol dalam berbagai kemelut di tubuh PDI sudah berlangsung sejak lahirnya PDI. Peranan pemerintah juga sangat kentara dalam era naiknya Soerjadi sebagai DPP PDI. Saat itu pemerintah menunjuk Soerjadi menduduki tampuk pimpinan partai periode 1986-1993, setelah kegagalan Kongres III PDI di Jakarta. Sama seperti kekisruhan sebelumnya, kekisruhan selalu terjadi pada bagian tata

cara pemilihan pengurus baru di DPP, alias terjadi perebutan jabatan partai. Melalui Menteri Dalam Negeri Supardjo Rustam, pemerintah sebagai pemegang mandate pembentukan

kepengurusan DPP PDI saat itu menunjuk Soerjadi sebagai Ketua Umum yang didampingi Sekjen Nicolaus Daryanto.

Namun dalam perjalannya, sikap Soerjadi yang diharapkan akomodatif terhadap kebijakan Presiden Soeharto, dalam kenyataannya justru berlawanan. Tidak tanggung-tanggung kritik bahkan ditujukan kepada Presiden Soeharto langsung.

Isu paling berani adalah tentang pembatasan masa jabatan Presiden serta pemilihan Presiden dan Wapres dengan mekanisme suara terbanyak. Pada saat itu, mekanisme suara terbanyak (voting) merupakan barang “halal” yang dianggap tabuh. Pemerintahan Soeharto pada saat itu berusaha keras menekankan perlunya dikedepankan musyawarah mufakat dalam mengambil sebuah keputusan bersama. Dalam tubuh partai PDI, Soerjadi mendorong keberanian kader PDI agar menolak menandatangani perolehan suara Pemilu 1993 jika mereka menilai hasil itu mengandung kecurangan.

Terlepas dari intervensi dan tekanan terhadap DPP PDI, di tangan Soerjadi PDI berkembang pesat menjadi partai yang kian di perhitungkan. Artinya, niat pemerintah yang ingin mengkerdilkan PDI tidak berhasil. Sebaliknya pada pemilu 1992 perolehan suara PDI

meningkat. Yang menjadi salah satu strategi PDI adalah mengomodir tampilnya

Keluarga Bung Karno dan menonjolkan semangat Soekarnoisme. Pada masa inilah muncul nama-nama seperti Megawati Soekarnoputri, Guruh Soekarnoputra, BN Marbun, Laksamana Sukardi, maupun Soegeng Sarjadi. Hasilnya, dua kali masa kepemimpinan Soerjadi, PDI berhasil menambah perolehan 32 kursi di DPR-RI.

Sosok Megawati Soekarnoputri, putri Soekarno yang awalnya hanya sebagai *vote getter*, pelan namun pasti, kian akrab dikenal publik. Naiknya nama Megawati Soekarnoputri sedikit banyak merupakan boomerang akibat menggebu-gebu intervensi oleh pemerintah sendiri. Kekisruhan Kongres IV PDI, 21-25 Juli di Medan, berakibat tidak diakuinya segala keputusan dalam kongres, termasuk terpilihnya Soerjadi sebagai pimpinan DPP PDI. Padahal, saat itu Soerjadi terpilih secara aklamasi. Untuk mengisi kekosongan pimpinan PDI, sebagai pimpinan sementara PDI, pemerintah menunjuk DPP *caretaker* pimpinan Latief Pudjosakti yang saat itu menjabat ketua DPD Jawa Timur. Latief bertugas mempersiapkan Kongres Luar Biasa (KLB) di Surabaya.

Dua pekan menjelang KLB, nama Megawati mulai disebut-sebut sebagai salah satu calon Ketua Umum. Yang pertama kali melontarkan adalah para pengurus PDI Solo dengan dikordinir Makyo Sumarno, ketua DPC PDI Solo. Tak dinyana sebelumnya, lontaran Makyo itu rupanya mengena di hati anggota dan simpatisan PDI yang lain.

Pemerintah pun dibuat kelabakan oleh strategi Makyo itu. Niat menjegal Soerjadi justru memunculkan “musuh” politik yang lebih berbahaya: anak Soekarno.

Kekhawatiran pemerintah itu memang terbukti. Sejak pencalonan Megawati sebagai Ketua Umum PDI, dukungan spontan datang dari berbagai lapisan. Tak hanya dari anggota PDI, namun juga dari kalangan masyarakat luas. Demi mempersiapkan pencalonannya yang serius, maka Tim Sukses pun dibentuk. Anggotanya antara lain Taufik Kiemas~suaminya, Aberson Marle Sihalohe, Mangara Siahaan, Suparlan, Panda Nababan, dan Sophan Sopiaan. Megawati juga meluncurkan buku Bendera Sudah Saya Kibarkan yang berisi tentang program-program politik dan ekonomi yang akan dicanangkan Megawati seandainya kelak bisa memimpin partai.

Melihat gelagat terbitnya anggota keluarga Soekarno di tubuh PDI, pemerintah menyikapi dengan berbagai cara. Salah satunya, melalui jaringan pejabat sospol daerah menghambat para pendukung Megawati menjadi utusan dalam KLB Surabaya. Utusan-utusan PDI yang mendukung Megawati seperti Tarmidi Soehardjo, Azis Boeang dan Subur Budiman, sebagian dicekal dan digantikan orang-orang yang sebelumnya pernah mengacaukan Kongres Medan.

Tak luput pula Megawati sendiri sempat mengalami percobaan pencekalan, ketika rekomendasi sebagai utusan DPC PDI Jakarta Selatan ditahan Ketua DPD Jakarta, Alex Asmasoebrata. Akhirnya meski digoyang kiri-kanan, dukungan terhadap Megawati bukannya berkurang namun sebaliknya.

Langkah terpilihnya Megawati sebagai Ketua Umum PDI dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Surabaya mirip-mirip dengan pola curi kesempatan saat proklamasi Kemerdekaan. Betapa tidak, KLB yang berlangsung lima hari tersebut

(2-6 Desember 1993) akhirnya tidak menemukan titik temu. Para pesaing Megawati dengan dukungan sebagian besar DPP *caretaker* berhasil menghambat jalannya kongres dengan memaksakan sistem formatur dalam tata tertib pemilihan ketua umum. Meskipun hampir seluruh peserta tidak

setuju dan menginginkan sistem pemilihan langsung, namun Latief Pudjosakti sebagai pimpinan siding tetap bersikeras memakai sistem formatur sebagaimana diinginkan pula oleh pemerintah. Hasilnya, KLB PDI Surabaya dinyatakan macet.

Namun Megawati tak ingin menunggu terlalu lama. Beberapa menit sebelum izin KLB habis, Megawati menyatakan diri secara *de facto* sebagai Ketua Umum PDI periode 1993-1998 lewat sebuah konperensi pers di hadapan seluruh utusan DPC-DPC dan media massa. Segera setelah pernyataan selesai dilontarkan, tepat pukul 00.00 WIB, sekitar 500 polisi dan pasukan anti huru-hara membubarkan seluruh peserta KLB dan mengambil ahli seluruh kendali asrama Haji Sukolilo, Surabaya.

Selesai KLB di Surabaya, berbagai upaya lanjutan dilakukan kubu *caretaker* dan DPP Peralihan untuk menjegal Megawati masih berlangsung hingga saat penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) di Jakarta. Latief Pudjosakti, Ketua *caretaker* menyatakan bahwa KLB Surabaya telah gagal dan memohon kepada pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini.

Besarnya dukungan terbuka dari public berupa gerakan-gerakan massa menyebabkan pemerintah dan Presiden Soeharto merubah haluannya dalam menghadapi Megawati. Terlebih, Megawati sendiri tidak tinggal diam. Selepas

KLB Surabaya, bersama para pendukungnya ia melakukan manuver safari politik ke beberapa petinggi pemerintahan dan ABRI.

Boleh jadi, karena pertimbangan politik atas kondisi di masyarakat, pada saat Munas berlangsung 22 Desember 1993, langkah pengukuhan Megawati sebagai Ketua Umum mulus tak terhalang sama sekali. Proses pemilihan hanya berlangsung lima menit, tepat pada pukul 20.40 WIB sebanyak 54 fungsionaris DPD dari 27 Provinsi secara aklamasi memilih Megawati. Kekuasaan de facto dan de jure sebagai ketua Umum PDI akhirnya sampai juga ke tangan Megawati.

Tak disangkal, naiknya Megawati Soekarnoputri ke tampuk PDI mengkhawatirkan pemerintah. Berbagai hasil analisis ahli politik Soeharto menyatakan, munculnya sosok Megawati akan meradikalisasi suara masyarakat yang sudah jenuh dengan segala stabilitas ala Orde Baru menyikapi hal itu, langkah-langkah pengembosan PDI yang selama ini dilakukan pun kemudian lebih diintensifkan, salah satunya dengan memfasilitasi dan memperbesar konflik yang sedang terjadi

antara kubu Megawati dan kubu Soerjadi maupun di dalam jajaran pengurus PDI lainnya.

Puncak kemelut penjegalan Megawati oleh pemerintah terjadi dalam scenario Kongres Medan yang digelar kubu Soerjadi pada tahun 1996. Pada awalnya, sejumlah cabang di daerah memberitahukan Mega bahwa mereka telah ditekan oleh pihak militer setempat agar mau mendukung penyelenggaraan Kongres Medan. Sebaliknya, ABRI saat itu berkilah bahwa apa yang dilakukan

semata-mata permintaan dari para senior PDI di bawah koordinasi Fatimah Achmad.

Toh, gerakan kelompok Fatimah Achmad yang didukung pemerintah akhirnya berhasil menyelenggarakan Kongres PDI di Medanyang hasilnya menunjuk Soerjadi sebagai Ketua Umum. Kemesraan Soerjadi dengan pemerintah dan ABRI dalam perencanaan dan pelaksanaan kongres membuktikan lagi ambivalensi penguasa yang dahulu memusuhi Soerjadi. Setelah diorbitkan pada 1986, Soerjadi dihempaskan lagi pada 1993 dan akhirnya dirangkul kembali pada 1996.

Di antara berbagai kemelut politik yang pernah menimpah PDI, Kongres Medan yang bertujuan menggoyang kepemimpinan Megawati ini memiliki akibat yang paling merusak. Pendukung dan simpatisan Megawati/PDI di berbagai kota bergerak. Kemarahan pendukung dan simpatisan Megawati di beberapa kota mengundang terjadinya bentrok berdarah dengan aparat keamanan. Sehari sebelum kongres versi Soerjadi dibuka 20 Juni 1996, ribuan warga PDI di Jakarta melakukan gerakan *long march* menolak kongres.

Pendukung dan simpatisan Megawati mengubah jalanan di depan kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat menjadi ajang mimbar bebas. Setiap hari selama kongres berlangsung dan sesudahnya, kantor itu menjadi ajang tumpahnya unek-unek dan kekecewaan terhadap berbagai kondisi politik yang ada. Tak hanya soal kongres, namun melebar pula pada kondisi politik negara. Tak hanya kader PDI, namun juga tokoh-tokoh LSM. Kondisi itu terus berlanjut

hingga akhirnya pemerintah habis kesabaran dan atas permintaan kubu Soerjadi, memutuskan merebut kantor DPP PDI.

Pada peristiwa yang terkenal dengan peristiwa “27 Juli” tersebut, kelompok massa yang menamakan dirinya Pro Kongres medan dibantu aparat keamanan, merebut secara paksa kantor DPP PDI. Dengan alasan merebut kantor DPP dari pendudukan pengurus ilegal. Akibat peristiwa tersebut, tercatat lima korban tewas, puluhan

hilang dan ratusan luka-luka. Peristiwa itu menjadi pengalaman paling kelabu dalam sejarah PDI hingga saat ini.

Tejadinya dualisme PDI menimbulkan berbagai friksi di lapisan bawah, mulai dari demo-demo hingga berbagai aksi penolakan pada tokoh PDI Soerjadi. Demonstrasi antara lain terjadi di Jakarta pada 19 Desember 1996, di mana massa pendukung Megawati mendatangi gedung DPR/MPR, Markas Besar Kepolisian hingga rumah dinas Soerjadi.

Menjelang Pemilu 1997, persaingan antara PDI Soerjadi dan Mega kembali terjadi dalam proses pengajuan caleg yang mewakili PDI. Keduanya mengajukan daftar caleg namun pemerintah tampak condong mengakui PDI pro Soerjadi. Yang diterima pencalonannya oleh LPU adalah daftar caleg versi Soerjadi meski hal ini banyak diprotes masyarakat luas.

Akibat berbagai perlakuan pemerintah yang dipandang tak adil dan mengingkari PDI yang sejati, Megawati pada 22 Mei 1997 secara resmi menyatakan tidak

menggunakan hak pilihnya. Sementara kepada para pendukungnya, Megawati mempersilahkan mengikuti keinginan hati masing-masing.

Imbas dari berbagai kemelut internal PDI serta sikap Megawati terhadap Pemilu terlihat dalam perolehan kursi PDI. Dibandingkan hasil Pemilu 1992, perolehan suara PDI secara nasional anjlok dari 14,89 persen menjadi 3,09 persen. Akibatnya, kursi DPR yang diraih juga terpasas dari 56 kursi menjadi 11 kursi.

Sebaliknya, berbagai tekanan yang dilakukan rezim yang berkuasa terhadap Megawati tidak membuat partai yang rawan konflik ini menjadi surut. Bahkan, simpati dan dukungan spontan dari masyarakat khususnya lapisan bawah kian besar. Posko-posko PDI didirikan di berbagai wilayah dan tumbuh seperti jamur di musim hujan. Masyarakat dengan sukarela menyumbangkan sebagian miliknya untuk menunjukan pembelaan terhadap PDI pimpinan Megawati. Kedekatan PDI dengan warga masyarakat kelas bawah akhirnya merembet pada kelas menengah dan kian mengokohkan citra PDI.

Boleh jadi, karena banyaknya gugatan hukum yang diajukan kepada PDI versi Soerjadi, maka pemerintah akhirnya mengakui keberadaan PDI Megawati secara terbuka. Pada 16 Juli 1997 melalui Mendagri Syarwan Hamid dinyatakan bahwa tidak keberatan dengan

adanya dua PDI. Setelah itu peringatan peristiwa 27 Juli diperbolehkan di kota-kota besar selain Jakarta oleh Menhankam Wiranto.

Menguatnya citra PDI dibawah pimpinan Megawati membuat partai ini

memiliki kesempatan melakukan pembenahan internal. Merebaknya aksi massa dan lengsernya presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 membuka lembaran baru bagi PDI Perjuangan untuk kian mengokohkan organisasi partai yang selama ini kerap dilupakan.

Politik mulai berhembus ke arah PDI Megawati itu disambut dengan percaya diri oleh kader PDI. Di Sumatera Utara, massa PDI pro Mega bentrok dengan massa Soerjadi untuk merebut kantor DPC PDI-Sumut. Melalui Syarwan Hamid, pemerintah kembali membuka “kesempatan” kepada Megawati dengan mendorong membentuk partai baru. Pernyataan itu dikeluarkan Syarwan pada 28 Mei 1998 setelah berbagai peristiwa hilangnya aktivis demokrasi termasuk kader PDI, Haryanto Taslam.


Perkembangan selanjutnya, serta didorong oleh tuntutan situasi dalam kondisi politik nasional, maka pada tanggal 1 Februari 1999, PDI pro Mega akhirnya membentuk partai baru yang merupakan kelanjutan tak terpisahkan dari PDI yang didirikan pada 10 Januari

1973. Nama partai diubah menjadi PDI Perjuangan, dengan azas Pancasila berisikan Kebangsaan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial. Selain nama, PDI Perjuangan juga merubah logo kepala banteng dalam segilima menjadi banteng gemuk dalam lingkaran.

Bentuk keindonesiaan yang dituju adalah Indonesia yang bebas dari segala bentuk penjajahan antar manusia. Kader PDI Perjuangan baik yang menduduki posisi structural, legislative maupun eksekutif ditandai dengan semangat derajat

integrasi bangsa yang tinggi baik dalam bidang sosial maupun politik. Hal ini dijalankan secara nyata oleh PDI Perjuangan dengan terutama menembus sekat-sekat kesukuan dan agama. Dicontohkan, dalam kepengurusan PDI Perjuangan di daerah, seorang Komaruddin yang beragama Islam bisa menjabat ketua DPD PDI Perjuangan Maluku, sementara di Jawa Timur yang mayoritas Muslim Ketua DPD dijabat oleh Yohanes Widodo, seorang Kristen.

Pada akhirnya, perjuangan kelompok Megawati melalui PDI Perjuangan menuai hasilnya. Partai ini secara dramatis memenangkan Pemilu 1999 dengan perolehan 34 persen suara atau 36 juta pemilih. Sementara nasib tragis menimpa PDI Soerjadi yang saat itu dipimpin oleh Budi Hardjono, partai itu bahkan tidak tembus *electoral threshold*.



Menyikapi hasil Pemilu yang menempatkan PDI Perjuangan menjadi pemenang Pemilu, Kongres I PDI Perjuangan kemudian diadakan di Semarang yang berlangsung tanggal 27 Maret – 1 April 2000. Hasilnya disusun kepengurusan dan memantapkan Megawati sebagai Ketua Umum dan calon Presiden dari PDI Perjuangan. Hingga sekarang jabatan Ketua Umum masih dipegang oleh Megawati.

Kiprah PDI Perjuangan sebagai partai “wong cilik” saat Pemilu 1999 melengkapi daya tarik PDI Perjuangan. Semuanya dirangkum dengan daya tarik sosok Megawati yang didengung-dengungkan kedekatannya dengan Putra Sang Fajar, Soekarno. Hasilnya, spontanitas masyarakat, terutama di pulau Jawa, bergerak untuk membela dan memilih partai berlambang banteng gemuk ini.

B. Perspektif Ideologi dan Program Partai

Berikut adalah kerangka landasan yang menjadi dasar bagi PDI Perjuangan dalam melangkah di dunia politik, sebagaimana dituangkan dalam dokumen partai ini.

C. Azas

Partai ini berdasarkan Pancasila yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

D. Ciri dan Watak

Partai adalah organisasi politik terbuka untuk semua warga negara Indonesia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kedudukan, sosial, dan gender serta berwatak Kebangsaan Indonesia, Kerakyatan dan Keadilan Sosial yang perjuangannya berlandaskan Pancasila.



E. Tujuan

1. Tujuan Umum Partai

- a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945.
- b. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Tujuan Khusus Partai

Mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional guna membentuk Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan

melaksanakan ketertiban umum yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang berdasarkan Pancasila.

F. Fungsi

1. Mendidik, mencerdaskan dan menyadarkan rakyat agar sadar dan bertanggung jawab atas hak dan kewajiban sebagai warga Negara.
2. Menghimpun, merumuskan dan memperjuangkan aspirasi rakyat secara nyata.
3. Memperdayakan dan menggerakkan rakyat untuk berperan aktif dalam pelaksanaan Pembangunan Nasional.
4. Berpartisipasi dalam penyelenggaraan Negara dan/atau melakukan kontrol sosial secara kritis, korektif, konstruktif dan konsepsional.
5. Melaksanakan kaderisasi kepemimpinan nasional yang demokrasi dalam rangka peningkatan kualitas pengabdian Partai dan penciptaan pemerintah yang bersih dan berwibawa.



G. Platform

PDI perjuangan adalah organisasi politik yang terbuka untuk semua warga negara Indonesia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kedudukan sosial dan gender serta berwatak: Kebangsaan Indonesia, Kerakyatan dan Keadilan Sosial yang perjuangannya berlandaskan Pancasila. PDI Perjuangan telah berketetapan menjadikan dirinya sebagai sebuah partai modern yang mempertahankan jati dirinya sebagai Partai Kerakyatan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan.

Sebagai partai yang mempunyai roh *kedaulatan rakyat*, PDI Perjuangan dicirikan oleh adanya pengakuan dan penghargaan terhadap demokrasi *kebangsaan dan keadilan sosial*. Demokrasi menempatkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat yang diwujudkan melalui Kongres Partai. Kebangsaan menempatkan prinsip “kewarganegaraan” yang mengakui adanya kesamaan hak dan kewajiban warga negara tanpa kecuali sebagai dasar satu-satunya dalam pengelolaan partai. Bagi PDI Perjuangan prinsip ini menemukan bentuk kongkretnya lewat sifatnya sebagai partai terbuka yang menempatkan kemajemukan sebagai kekayaan dan rahmat Tuhan. Keadilan sosial

mengungkapkan komitmen PDI Perjuangan untuk senantiasa mengarahkan semua aktifitas bagi kepentingan rakyat banyak.

Cita cita Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil, dan makmur, serta beradab dan berketuhanan tidak hanya menuntut rakyat, tetapi juga menuntut komitmen, moralitas, dan etika yang tinggi bagi para penyelenggaranya.

BAB IV

PENDIDIKAN POLITIK PDI PERJUANGAN

Motivasi mendirikan PDI Perjuangan adalah membangun kembali jiwa bangsa Jiwa untuk menegakkan kembali kedaulatan, martabat dan kebanggaan sebagai sebuah bangsa; Jiwa untuk menegaskan kembali fungsi Negara dan sentralitas kepemimpinan serta manajemen berbangsa; dan jiwa untuk meneguhkan kembali kegotong-royongan di tengah mekarnya individualisme, konsumerisme dan mudarnya nilai-nilai voluntarisme.

demikian PDI perjuangan telah berkomitmen untuk mempercepat cita-cita Proklamasi sebagai tindak lanjut dari jalan ideologi sebagaimana diamanatkan dalam Kongres III melalui, Pertama, mengedepankan pengelolaan politik dan kebangsaan serta kehidupan bernegara berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kedua, PDI Perjuangan ingin menegaskan bahwa keadilan ekonomi merupakan syarat terwujudnya cita-cita kesejahteraan, dimana tidak ada kemiskinan dalam buminya Indonesia Merdeka. Atas dasar hal itu, Negara harus menjamin agar sebanyak-banyaknya rakyat terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif, mendorong akses dan kepemilikan rakyat terhadap permodalan, informasi dan pasar. Ketiga, dalam menghadapi gempuran globalisasi dan menjamin terciptanya masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan, PDI Perjuangan memandang perlu dilakukan intervensi kebudayaan untuk membangun karakter nasional yang berlandaskan semangat gotong-royong,

memiliki toleransi dan kohesi sosial yang tinggi, bercirikan musyawarah mufakat dan kebhinekaan sebagai fundamen bagi sistem politik, ekonomi dan sosial.

Berdasarkan pengamatan penulis prioritas utama yang dilakukan PDI PERJUANGAN adalah kekutan ekonomi. Bagaimana ekonomi masyarakat dibangkitkan, dengan terbuka lebar nya peluang masyarakat untuk mengeksplorasi daya produktif mereka. Bangsa yang mandiri adalah masyarakatnya mampu dan layak untuk mecukupi kebutuhan pribadi. Tetapi semua ini tentunya dengan dukungan infrastruktur mauoun suprastruktur yang memadai serta bersi dan layak.

A.Peran PDI Perjuangan dalam pendidikan politik

Bentuk bentuk pendidikan politik yang dilakukan PDI PERJUANGAN khususnya di DPC kabupaten Mesuji. dengan melakukan konsolidasi di berbagai tingkatan di antaranya dari tingkat DPC ranting sampai anak ranting, melakuakn kampanye politik, seminar politik, diskusi politik, pendidikan politik partai PDI Perjuangan ini di ajukan kepada kelompok profesi, baik yang sudah terorganisir maupun yang belum terorganisir, dari kelompok masyarakat maupun pedagang kecil, pengrajin sektor informal dan lain-lain.

Mengingat jumlah masyarakat yang sangat besar dan terkategori, penduduk Indonesia yang luas serta merupakan masyarakat profesi, maka perlu kiranya melihat kelompok masyarakat yang beprofesi dan selanjutnya di kategorikan. Sebagai contoh, profesi sebagai petani dan nelayan dapat dijadikan prioritas utama, dalam pengembangan program ini. pengembangan program

melalui kelompok profesi masyarakat di anggap perlu, secara territorial bangsa kita berimbang baik darat dan lautnya.

Program ini difokuskan pada praktek-praktek usaha yang sudah dijalankan oleh masyarakat. Kerjasama dalam pengembangan program kelompok profesi masyarakat dapat dilakukan dengan lembaga keuangan, lembaga distribusi, lembaga pemasaran, lembaga profesi dan lembaga pendidikan terkait dengan komoditas yang dikembangkan oleh kelompok profesi masyarakat. Hal ini tidak lain untuk mutu usaha masyarakat.

Bentuk kegiatan yang dilakukan PDI Perjuangan dilapangan adalah studi lapangan atau praktek dan percobaan atau percontohan. Keberhasilan pengembangan kelompok profesi masyarakat sangat ditentukan oleh tingkat kepedulian kader partai terhadap upaya pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat. Oleh karena itu, semua elemen organisasi harus bersikap untuk mendukung terselenggaranya program ini. Pengoptimalan program pengembangan kelompok profesi masyarakat dapat di bentuk melalui lembaga atau yayasan maupun institusi lain yang berfungsi sebagai fasilitator. Pendidikan dan latihan (Diklat) kader PDI Perjuangan menjadi hal yang sangat penting dilakukan untuk merebut masa depan. Pendidikan dan latihan (Diklat), kader dan anggota partai akan memantapkan kembali pemahamannya hal ini sangat mendukung bagi upaya partai merebut masa depan. Pemahaman yang lebih baik tentang materi-materi yang di sajikan dalam pendidikan dan latihan (Diklat) kader, diyakini akan mampu meningkatkan performa kader ataupun anggota serta kelembagaan ke depan. Ini merupakan

pembuktian yang kongkrit bahwa partai melakukan pendidikan politik, khususnya di DPC kabupaten Mesuji dengan melihat beberapa hal diantaranya adalah struktur dan komposisi kepengurusan tingkat kecamatan dan kelurahan yang telah dibentuk, dan struktur dan komposisi kepengurusan organisasi sayap tingkat kecamatan dan kelurahan

Kampanye yang dilakukan PDI Perjuangan yang juga merupakan bagian dari pendidikan adalah penyampaian materi yang dianggap lebih mempunyai nilai nasionalisme yang tinggi. Materinya pun telah ditentukan dalam rapat konsolidasi (RAKON).

Proses pendidikan dan pembelajaran secara berkala, tetapi hal ini merupakan bagian dari pendidikan politik ketika menjelang pesta demokrasi. PDI Perjuangan secara rutin melakukan pendidikan politik kepada kader. Nanti kader yang secara langsung bersentuhan langsung dengan masyarakat. Keinginan partai untuk tetap melaksanakan salah satu fungsi terbentuknya partai politik adalah melaksanakan pendidikan politik dan ini telah terbukti. Hasil pendidikan politik yang bisa dilihat secara kasat mata adalah bahwa PDI Perjuangan masih tetap menjadi partai kepercayaan rakyat.

Uraian diatas menjelaskan bahwa bentuk pendidikan politik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan kabupaten Mesuji terfokus pada kader dan masyarakat dengan pola pelatihan maupun pembinaan profesi. Menurut penulis apa yang dilaksanakan oleh PDI Perjuangan masih bersifat inklusif walaupun sudah sejalan dengan undang-undang. Inklusif yang dimaksud penulis adalah bagaimana model pengkaderan tidak diperjelas, terkait proses perjenjangan yang

tidak dilakukan. Tanpa adanya model atau pola perjenjang pendidikan politik yang jelas maka ini akan mempengaruhi tingkat militansi kader. Tolak ukur keberhasilan partai politik tidak sepenuhnya di tandai oleh seberapa banyak kader yang duduk di lembaga eksekutif dan legislatif, tetapi sejauh mana kemampuan kader mempunyai jiwa kemandirian, mempunyai rasa tanggung jawab dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara.

B. Pendidikan Politik yang dilakukan oleh Kader PDI Perjuangan

Upaya PDI Perjuangan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakatnya agar menjadi masyarakat yang mempunyai jiwa militan dan kritis terhadap partai maupun permasalahan bangsa ini tentunya mempunyai strategi serta upaya yang selama ini dilakukan demi terwujudnya visi dan misi partai strategi yang dimaksud adalah seni kecakapan PDI Perjuangan kabupaten Mesuji. Upaya memberikan pemahaman atau mentransformasikan nilai-nilai ke partai yang tentunya dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar masyarakat mempunyai jiwa militan dan mempunyai daya juang serta loyalitas yang tinggi.

Strategi pendidikan politik adalah cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi dalam lingkungan pengajaran tertentu. Meliputi sifat, lingkup dan urutan kegiatan yang dapat memberikan pengalaman kepada masyarakat kabupaten Mesuji.

Strategi pendidikan politik PDI Perjuangan terdiri atas semua komponen. Materi pembelajaran dan prosedur yang digunakan untuk membantu para masyarakat untuk dapat memainkan peran mereka di dunia politik, yang sesuai dan

sejalan dengan undang-undang yang berlaku. Strategi pendidikan politik PDI Perjuangan juga merupakan jenis latihan tertentu yang cocok dengan tujuan yang akan dicapai.

Metode adalah cara yang didalam fungsinya merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan. Makin baik metode yang di pakai , makin efektif pula pencapaian tujuan secara teori metode berbeda dengan teknik. Metode bersifat procedural, sedangkan teknik lebih bersifat implementatif. Pelaksanaan seperti apa yang sesungguhnya di lakukan kader terhadap masyarakat untuk mencapai tujuan. Terdapat berbagai teknik dan metode bagian partai politik untuk mengklarifikasikan dan mengelompokkan masyarakat . metode dan teknik ini berangkat dari suatu premis bahwa setiap individu cenderung untuk berinteraksi dengan orang-orang yang berkarakteristik sama. Kebersamaan orang-orang yang berkarakteristik sama ini lah yang membentuk suatu kelompok yaitu kelompok masyarakat. Mereka memiliki, ciri , sifat, kondisi psikologis, kepentingan, harapan, permasalahan dan tujuan hidup yang relative sama dibandingkan dengan orang-orang yang tidak terdapat dalam kelompok mereka. Hal ini yang memegang peranan penting adalah dimensi karakteristik dengan melihat kedekatan karakteristik partai politik dapat mengidentifikasikan anggota kelompok tersebut. Gambaran secara umum bagaimana strategi pendidikan politik PDI Perjuangan kabupaten Mesuji Selama ini adalah:

1. memahami persoalan masyarakat. Sebelum program pendidikan politik dilaksanakan apa yang sesungguhnya menjadi persoalan mendasar yang

sedang dihadapi masyarakat di suatu daerah, karan persoalan masyarakat di suatu daerah berbeda dengan persoalan masyarakat di daerah lainya.

2. Menentukan kebutuhan masyarakat. Setelah permasalahan mendasar masyarakat di ketauih, kemudian menentukan kebutuahn mereka berdasarkan skala prioritas. Skala prioritas ini akan menjadi sangat penting, terutama ketika kebutuhan san aspirasi masyarakat sangat banyak dan beragam.
3. Merumuskan tujuan yang dipilih kelompok sasaran. Rumusan dari tujuan pendidikan politik yang memberikan arah dan juga sasaran yang akan dicapai dari pihak penyelenggara. Kelompok sasaran bisa di tentukan setelah tujuan dari pendidikan politik berhasil di rumuskan.
4. Merancang aktivitas kerja dan menentukan media. Dalam , merancang aktivitas kerja, meliputi adalah:
 - a. rancangan kegiatan.
 - b. berapa lama waktu yang dibutuhkan.
 - c. Pembagian tugas dan tanggung jawab.
 - d. Fasiltias atau peralatan yang dimiliki.
 - e. Anggaran yang dibutuhkan.
5. melaksanakan aktivitas. Pelaksanaan kegiatan pendidikan politik yang menjadi efektif, jika dalam implementasinya dapat dilaksanakan sesuai rencana kerja

6. monitoring dan evaluasi hasil kerja, ini bertujuan untuk mengetahui apakah strategi yang digunakan cukup efektif atau harus di ruba dan apakah isu ini masih dapat diteruskan apa tidak.

Proses penyampaian materi nya dengan metode Tanya jawab, diskusi atau simulasi. Semua dikembalikan pada apa materi yang disajikan dalam proses penelitian yang diberikan.

Pendidikan politik adalah salah satu upaya strategis mendemokrasikan bangsa indonesia. Pendidikan politik yang dimaksud adalah model pendidikan yang berorientasi pada pembangunan karakter bangsa, sehingga menjadi masyarakat kritis, kreatif, partisipatif dan dapat mengaktualisasikan diri mereka. Dalam konteks ini proses demokratisasi tidak menjadi monopoli segelintir orang yang mengatasnamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum, tetapi masyarakat mempunyai kesempatan dan jaminan hukum yang sama untuk memberikan atau berpartisipasi untuk membangun bangsa ini.

Pendidikan politik PDI Perjuangan seperti yang telah di jabarkan sebelumnya, mempunyai arah dan tujuan yang jelas. Tanpa arah dan tujuan yang jelas maka perjuangan partai akan sia-sia. Isi pendidikan politik PDI Perjuangan saat ini hanya sebatas lebih memantapkan pemahaman masyarakat tentang politik yang ada di sekitarnya. Pemahaman yang lebih baik tentang perpolitikan yang telah di berikan akan berdampak kepada partisipasi politik.

Sejauh ini isi pendidikan politik PDI Perjuangan tentunya berpedom pada AD/ART partai dan sejalan dengan undang-undang. Materi pendidikan politik yang di sampaikan mencakup hal-hal sebagai berikut : pertama, posisi individu dalam kehidupan bernegara. Kedua, posisi konstitusi dalam kehidupan bernegara. Ketiga , posisi Negara dalam menjalin relasi dengan warga nya. Keempat, posisi individu, Negara dan konstitusi dalam konstelasi politik terkini. Kelima, pemenangan pemilu yaitu proses sosialisasi dan pemenangan. Berdasar kan uraian di atas bahwa secara konsep isi pendidikan politik PDI Perjuangan sudah sesuai dengan visi dan misi partai akan tetapi dalam proses berjalannya organisasi tidak ada kata sempurna, untuk itu PDI Perjuangan kabupaten Mesuji harus selalu berupaya untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara kepada masyarakat. Selama ini materi yang disuguhkan tidak terdokumentasi. Menurut pengamatan penulis materi yang disuguhkan dalam pendidikan politik sudah sesuai pada pencerminan bahwa PDI Perjuangan merupakan partai nasionalis. PDI Perjuangan sudah mendapat tempat yang tepat dalam diri masyarakat secara signifikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Peran kader PDI Perjuangan dalam pendidikan politik bisa di katakan sudah menjalankan peran mereka sebagai partai politik.

1. Strategi pendidikan politik PDI Perjuangan dengan menerapkan pola monitoring evaluasi dan agitasi, advikasi serta propokasi melauai strategi tersebut partai dapat dengan mudah masuk ke kehidupan masyarakat. Sehingga partisipasi masyarakat terhadap politik meningkat.
2. Bentuk pendidikan politik PDI Perjuangan antara lain latihan kepemimpinan, diaolog public, debat terbuka, kampanye dialogis, kelompok binaan atau menjalin mitra dan lain-lain yang sejenis dengan nya. Bentuk pendidikan politik yang dilaksanakan oleh PDI Perjuangan kabupaten Mesuji sesuai dengan fungsi nya selaku patrai politik
3. Isi pendidikan PDI Perjuangan. pertama, posisi individu dalam kehidupan bernegara. Kedua, posisi konstitusi dalam kehidupan bernegara. Ketiga , posisi Negara dalam menjalin relasi dengan warga nya. Keempat, posisi individu, Negara dan konstitusi dalam konstelasi politik terkini. Kelima, pemenangan pemilu yaitu proses sosialisasi dan

pemenangan. Hal ini sudah bisa mencerminkan bahwa PDI Perjuangan sebagai partai nasionalis.

B. Saran

Pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis ingin memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan proses pendidikan politik PDI Perjuangan kabupaten Mesuji. Lembaga besar tidak akan terhindar dari masalah yang besar. Kritik dan saran bukan dipandang sebagai upaya menjatuhkan. Melainkan lebih kepada proses refleksi kebelakang. Untuk kemudian melejit ke depan. Agar lebih mudah untuk menjalankan fungsi partai politik dalam hal ini proses pendidikan politik. Dan semoga ini menjadi saran yang membangun :

- 
1. melakukan regenerasi kader dengan cara yang lebih terpola. Sehingga kader yang memang berkualitas benar-benar lahir dari Rahim pengkaderan politik. Langkah nya membuat pola dan jenjang pengkaderan yang jelas dan tertib administrasi. Karna cermin baik atau tidak nya suatu lembaga adalah pada tertib administrasi.
 2. Kemenangan pada hakikatnya bukan hanya semata – mata ditandai dari sejauh mana partai bisa memenangkan calon nya, tetapi pada hakikatnya sejahumana program-program yang telah di rencanakan tersampaikan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Selalu tingkatkan dan jangan pernah merasa puas untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat.

3. Penyampaian materi pendidikan politik harus lebih di intenskan lagi kepada masyarakat sehingga semua pesan-pesan yang di ingin kan partai tersampaikan.
4. Penelitian sejenis ini perlu untuk dilanjutkan mengingat masih jarang nya penelitian yang fokus pada pendidikan politik terutama terutama yang difokuskan kepada masyarakat yang berada di daerah-daerah yang bisa di bilang terpencil. Peneliti mengharapkan setelah ini akan ada yang berminat untuk melakukan penelitian terkait dengan pendidikan politik ke daerah-daerah.



DAFTAR PUSTAKA

AD/ART PDI Perjuangan kongres IV di bali, h 62 pasal 1.2.3.4.5

Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta,

Djambak, Syaipan *Metodologi Penelitian*, Palembang, Universitas Sriwijaya :1998.

Hadi, Sutrisno *Metodologi Riseach II*, Yogyakarta, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM :1973.

Hasan, Iqbal *Pokok-Pokok Materi Metodologi Dan Aplikasinya*, Bogor, Ghalia Indonesia :2002.

Kartono, Kartini *Pendidikan Politik Sebagai Dari Pendidikan Bagian Orang Dewasa*, Bandung, Mandar Maju :2009.

Kaelan M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Jogjakarta, Paradikma:2005

Narbuto, Cholid Dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Bumi Aksara, :2008

Sudjana, Nana *Prosedur Karya Ilmiah*, Bandung, Sinar Baru :1991.

Soekanto, Soejono *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Jakarta, Rajawali :1986.

Firmanzah, *Mengelola Partai Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008.

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Mandar Maju, Bandung 1990.

M.D. Riyan, *Political Quontient Meneladani Prilaku Politik Para Nabi*, Madani Prima, Bandung, 2008.

Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2006,

Cet. Ke-28.

Syamsuddin Haris dan Ighes Kleden, *Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.

Tim Redaksi Fokusmedia, *Undang-Undang Politik*, Fokusmedia, Bandung, 2009.

Ihsan, Fuad, *Dasar-dasar Kependidikan*, jakarta : Rineka Cipta , 2008

Marbun B, N, *kamus politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.

Meriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* , jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1991.

<http://www.pdi-perjuangan.or.id/info/sejarah-partai-pdi-perjuangan/>

